



**PERAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH (TKPKD) DALAM SINERGITAS
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PENCEGAHAN ANAK Kerdil
(*STUNTING*)
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Disampaikan oleh:
Bupati Pasaman Barat**

Disampaikan pada
**Rapat Koordinasi Mendorong Konvergensi/Integrasi Program Percepatan
Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) di Wilayah Prioritas**

Jakarta, 21-23 November 2018

SISTEMATIKA PAPARAN

Gambaran Umum Pasaman Barat

Analisa Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan (termasuk Analisa Stunting)

Pemanfaatan Dana Desa untuk Intervensi Stunting

BAGIAN 1

GAMIBARAN UMIUM

KONDISI UMUM PASAMAN BARAT



Luas Wilayah : 3887,77 KM²

Batas Wilayah :

Utara : Kab. Mandailing Natal

Selatan : Kab. Agam

Timur : Kab. Pasaman

Barat : Samudera Indonesia

Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari :

11 Kecamatan

19 Nagari

212 Jorong

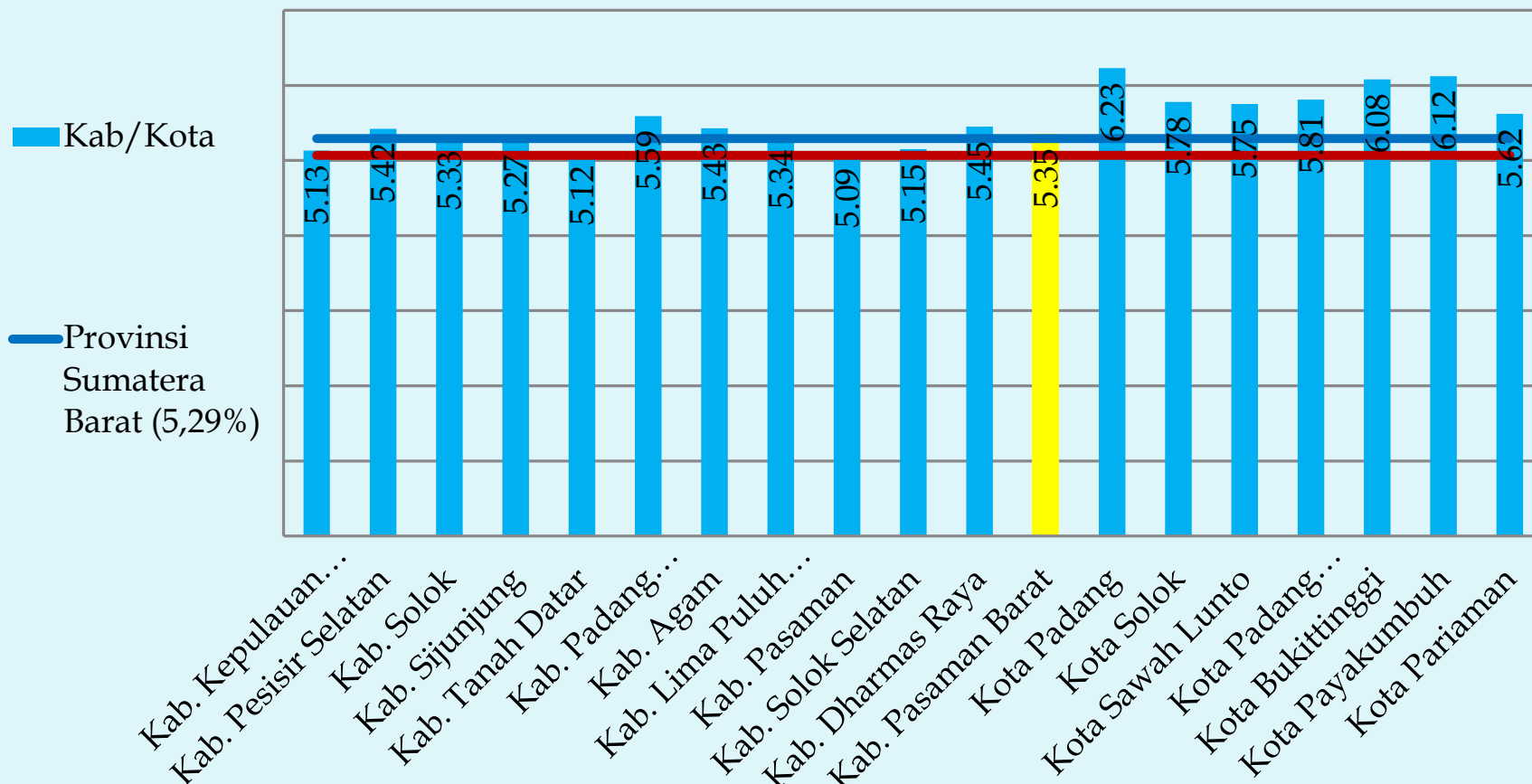
Jumlah Penduduk (2017) : 427.295 jiwa

Laki-Laki = 216.093

Perempuan = 211.202

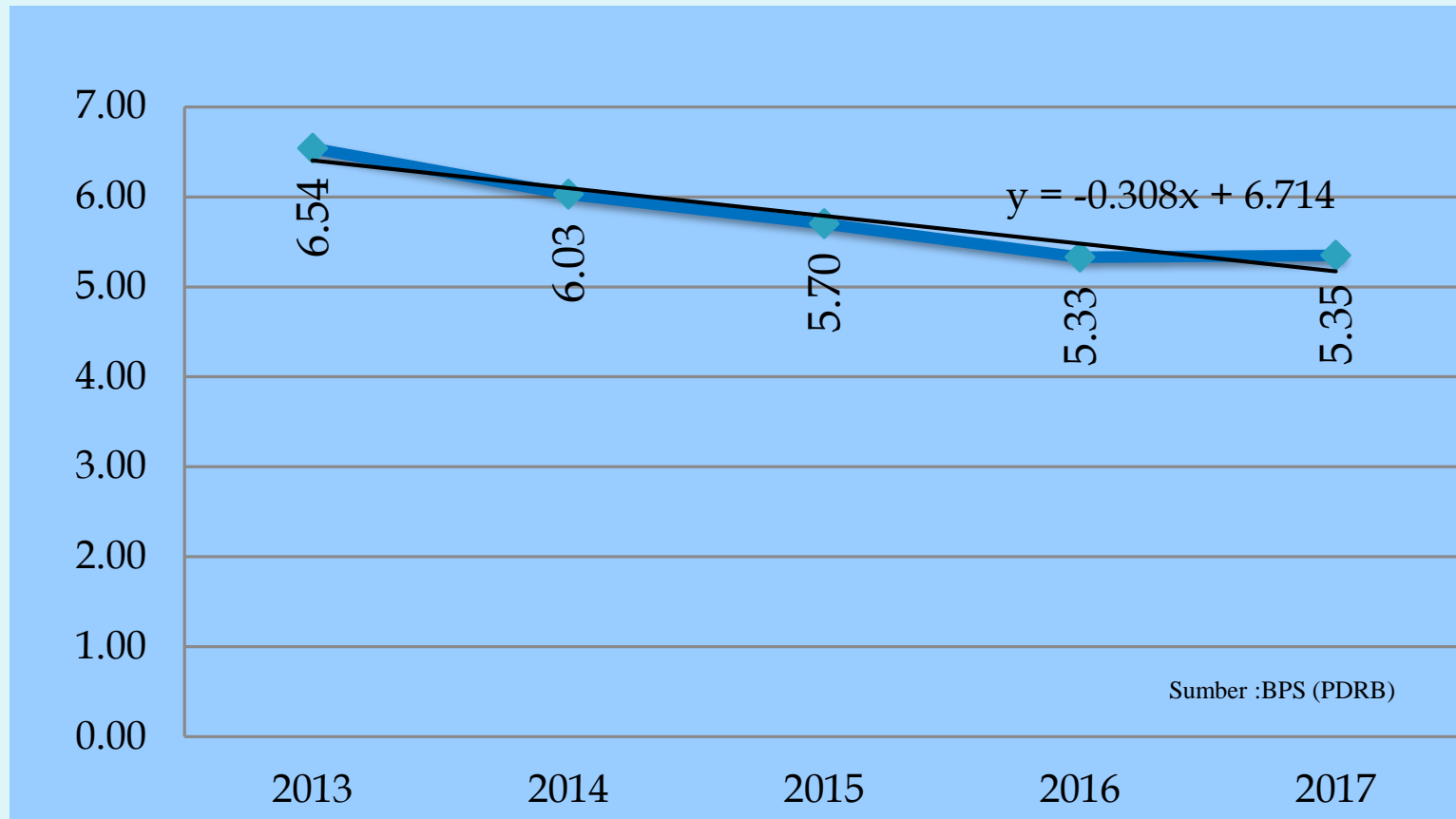
SR : 102

Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017



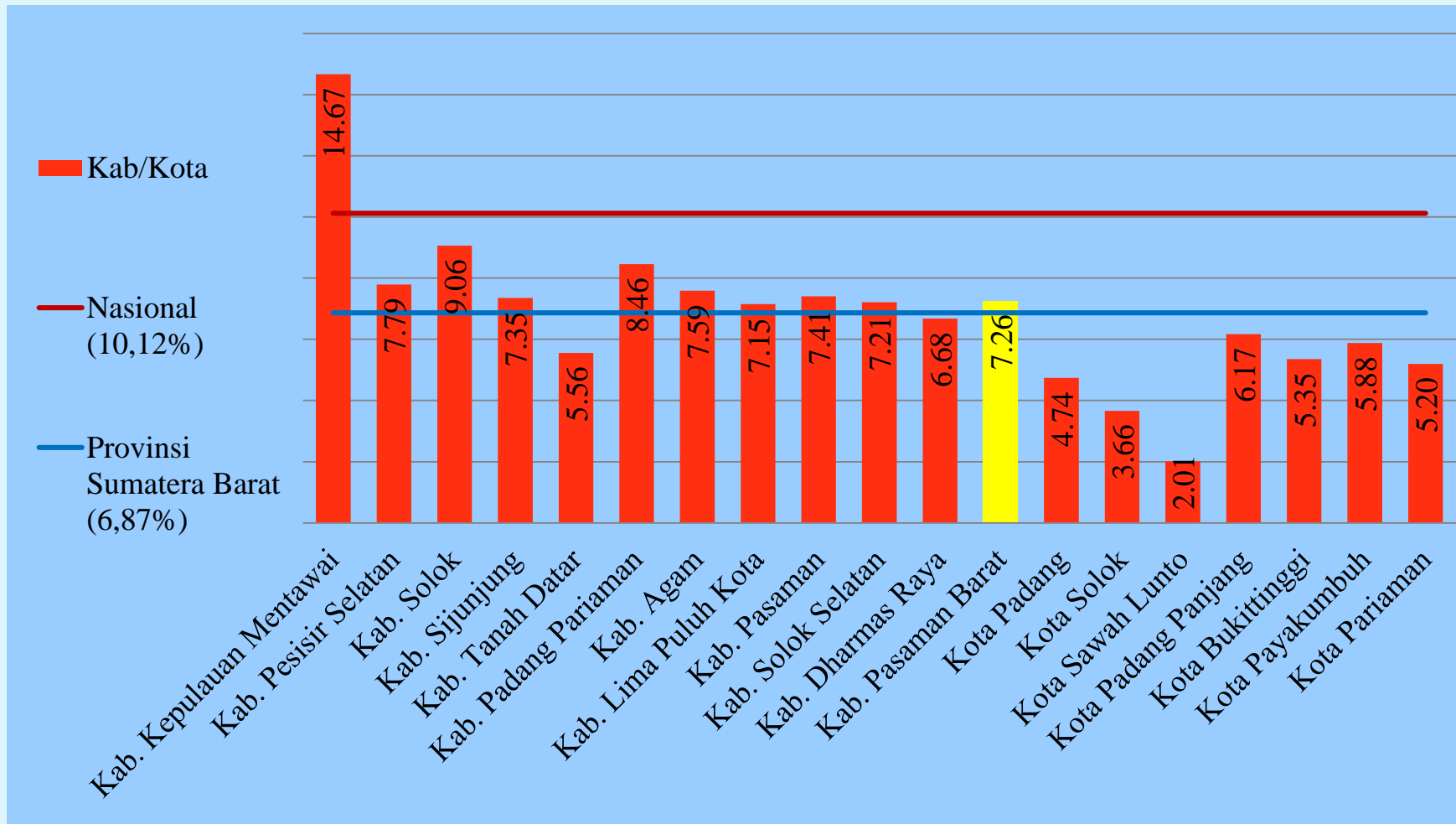
Keterangan: Pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat berada di posisi ke-12 dari 19 Kab/kota di Sumatera Barat, lebih tinggi dari rata-rata Propinsi Sumatera Barat

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pasaman Barat Tahun 2013-2017



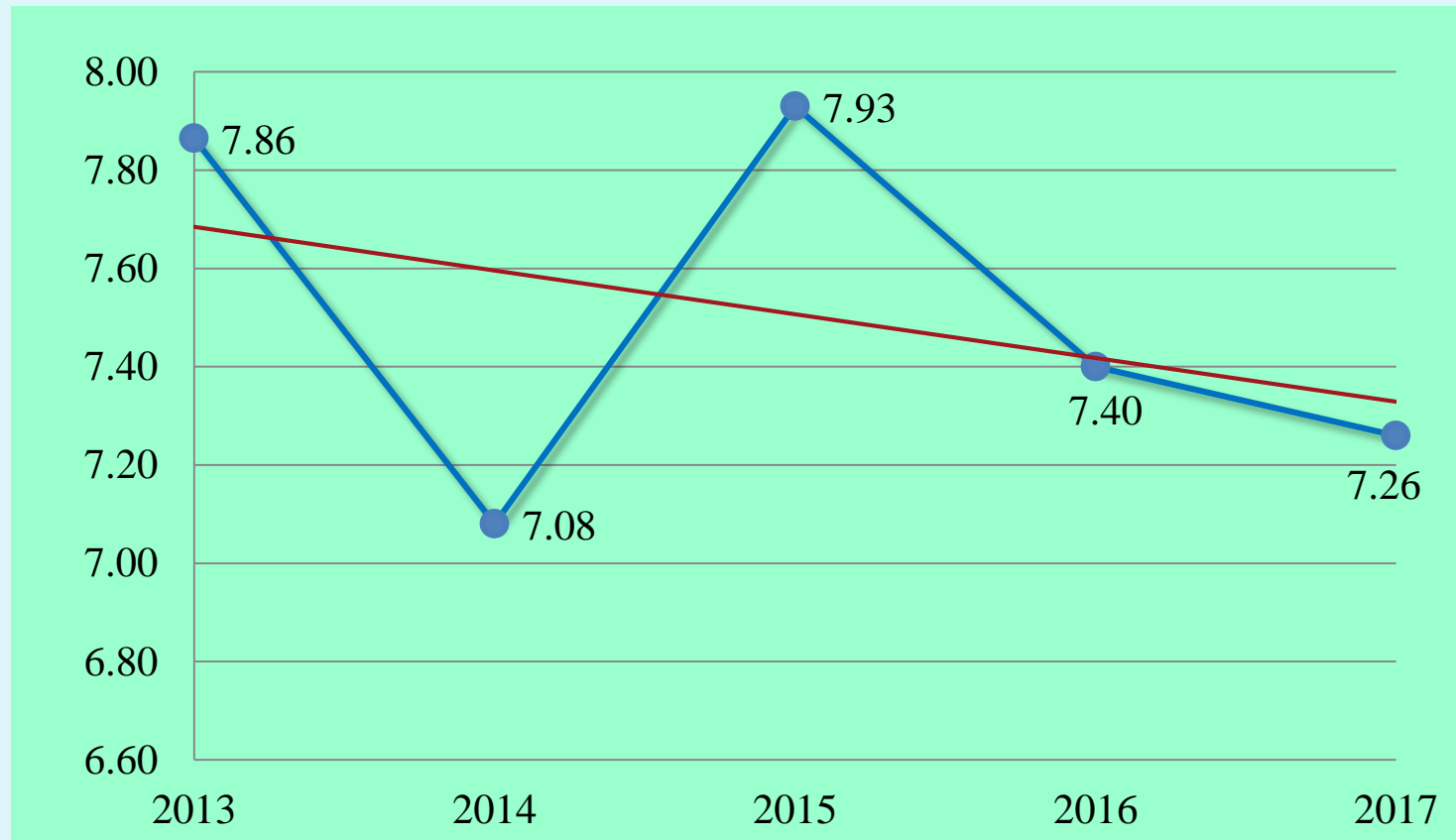
Keterangan: Pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat menunjukkan trend penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Sumatera Barat 2017



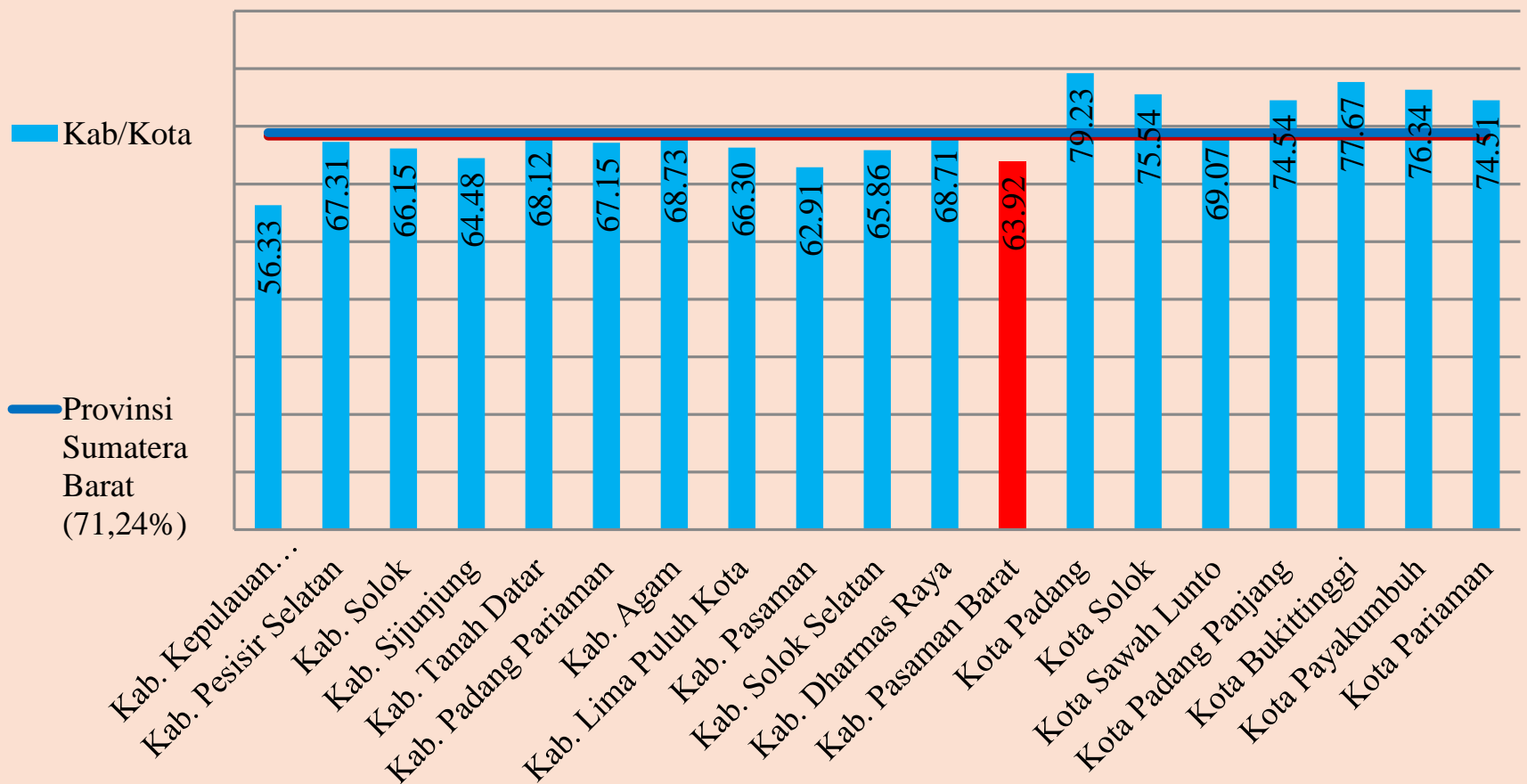
Keterangan: Angka Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat lebih tinggi dari rata-rata Propinsi Sumatera Barat namun lebih rendah dari rata-rata nasional

Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017



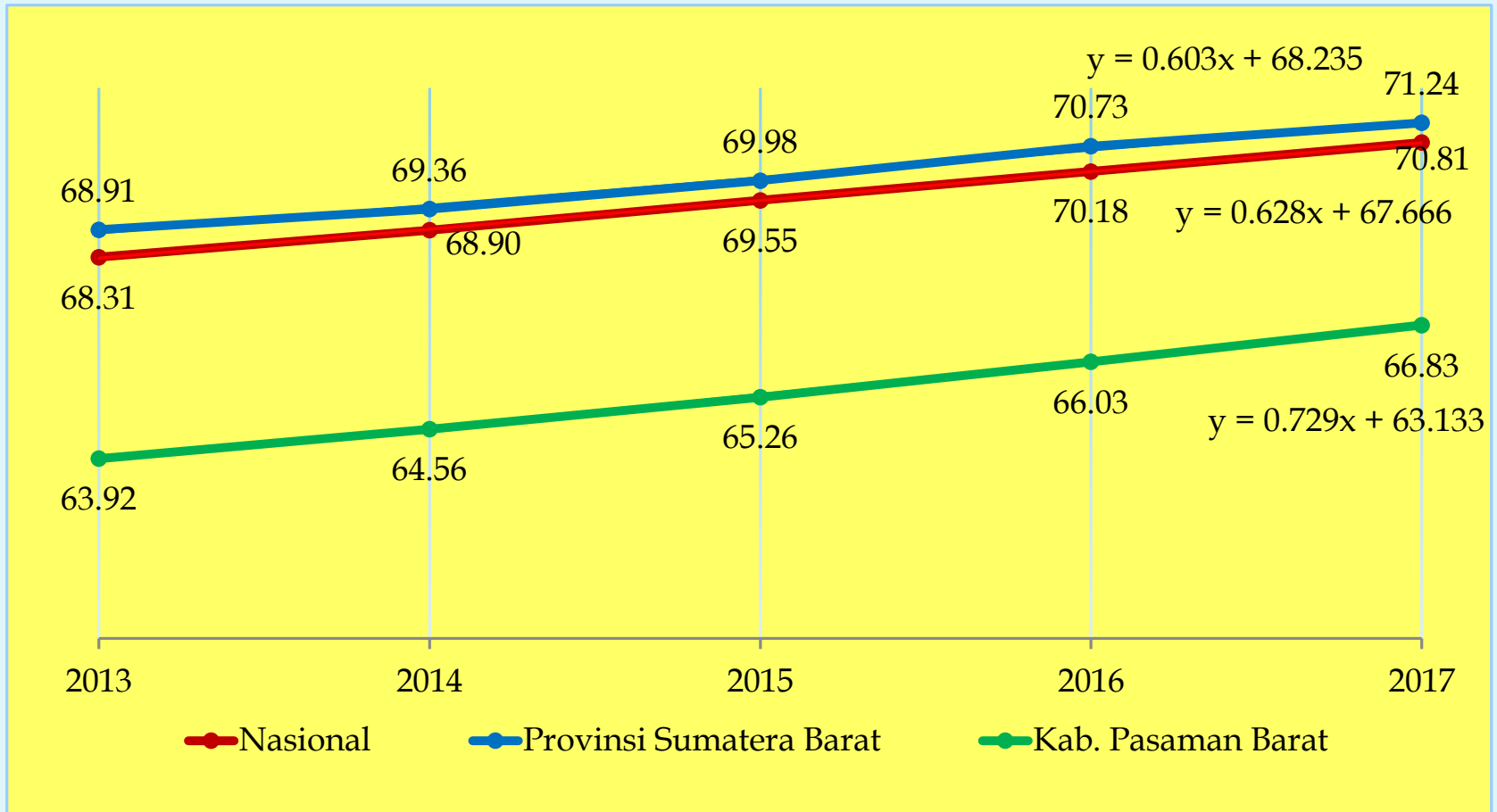
Keterangan: Angka Kemiskinan Pasaman Barat berfluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan trend penurunan, dari 7,86% pada tahun 2013 menjadi 7,26% pada tahun 2017.

Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017



Keterangan: IPM Pasaman Barat Tahun 2017 63,92, lebih rendah dari rata-rata Propinsi Sumatera Barat maupun nasional.

Relevansi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017



Keterangan: IPM Pasaman Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir, tumbuh lebih cepat daripada IPM Propinsi Sumatera Barat maupun nasional.

ANALISA BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

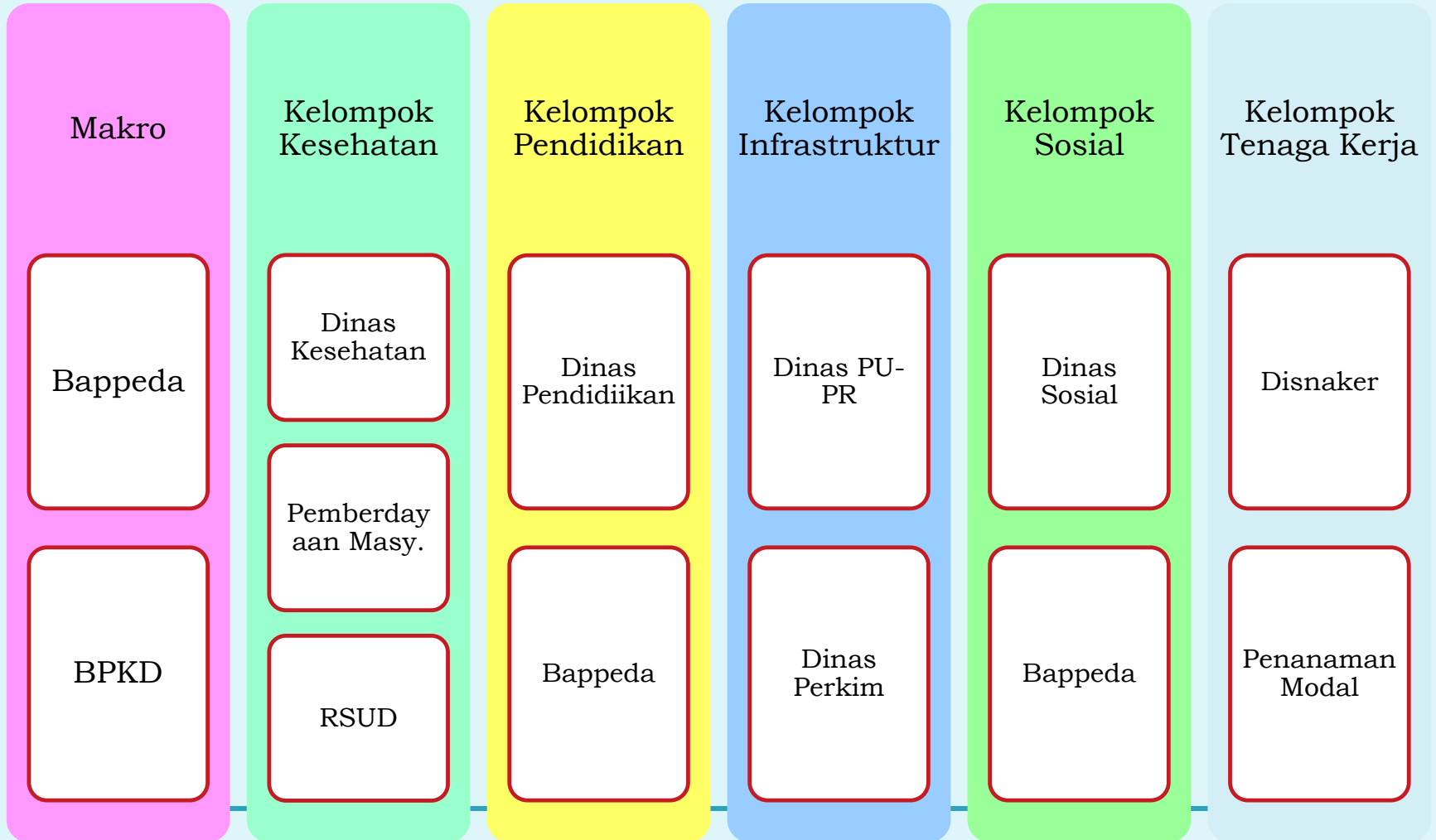
PERIODE ANALISA: NOVEMBER 2017 – SEPTEMBER 2018



1. KELEMBAGAAN



TKPKD



2. MEKANISME

Penetapan SK Pokja

- *By Name, untuk menghindari pergantian personil selama proses analisis*

Pendampingan oleh TNP2K

- ToT Analisa Belanja Publik
- Workshop di Kabupaten
- Workshop di Daerah

Fasilitasi oleh TKPKD

- Pertemuan Tim di Kabupaten
 - Pendampingan oleh Bappeda
 - FGD
-

3. TAHAPAN ANALISIS

Identifikasi Masalah

Analisa Posisi Relatif
Analisa Perkembangan AntarWaktu
Analisa Efektivitas
Analisa Relevansi Perkembangan

Analisa Keterkaitan

Mengidentifikasi Akar Masalah dari Isu Strategis Yang Diperoleh dari Identifikasi Masalah

Analisa Prioritas Intervensi Wilayah

Menganalisa wilayah-wilayah prioritas intervensi sesuai permasalahan

Analisa Anggaran

Menganalisa Alokasi Anggaran untuk Menyelesaikan Masalah

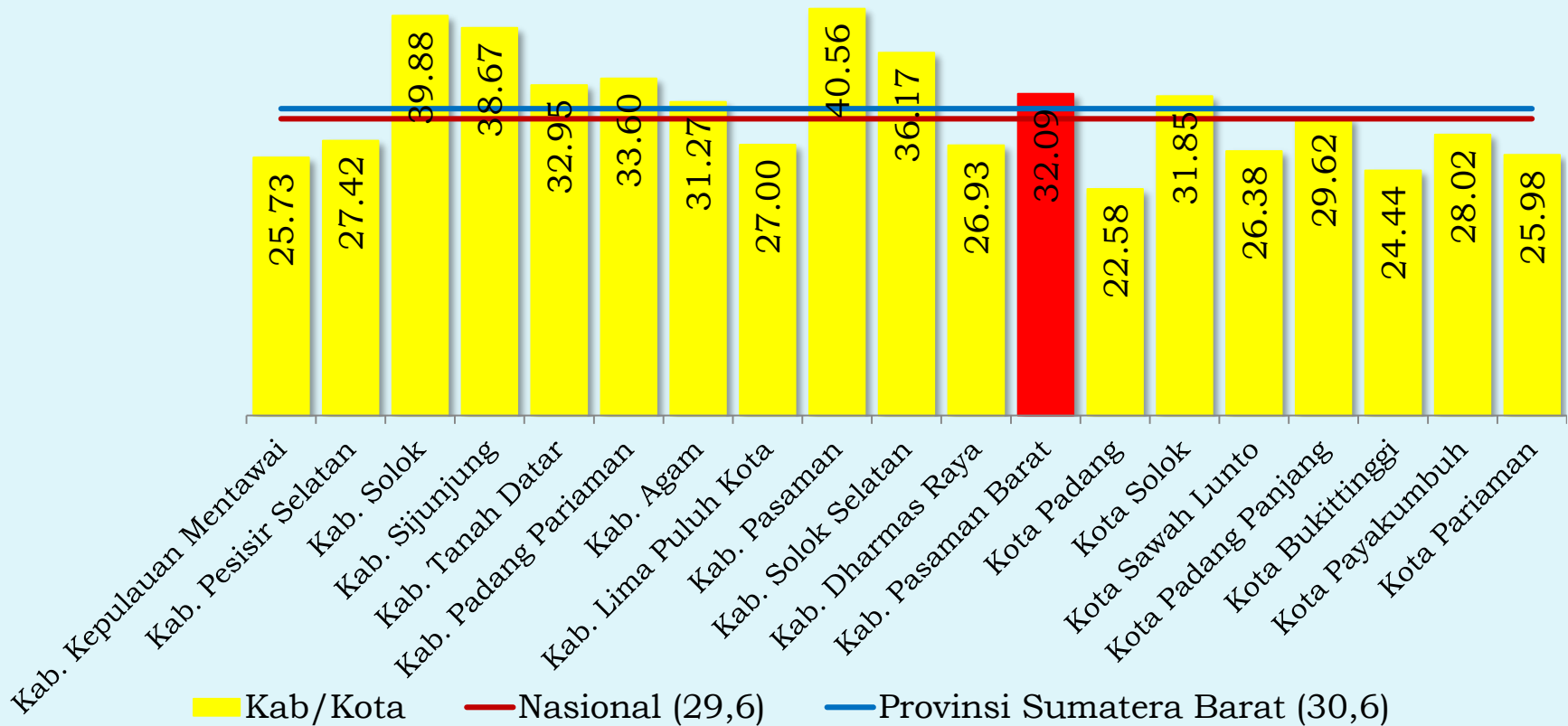
Penulisan Naskah



HASIL ANALISIS
Intervensi Stunting
di Kabupaten Pasaman Barat

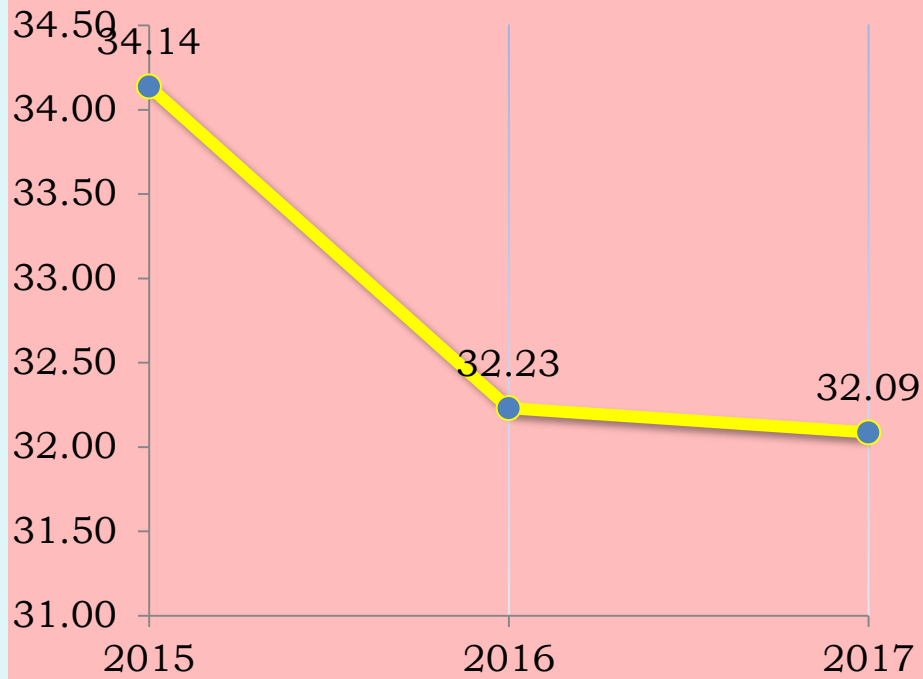
Posisi Relatif Stunting Pada Balita Propinsi Sumatera Barat tahun 2017

IDENTIFIKASI MASALAH



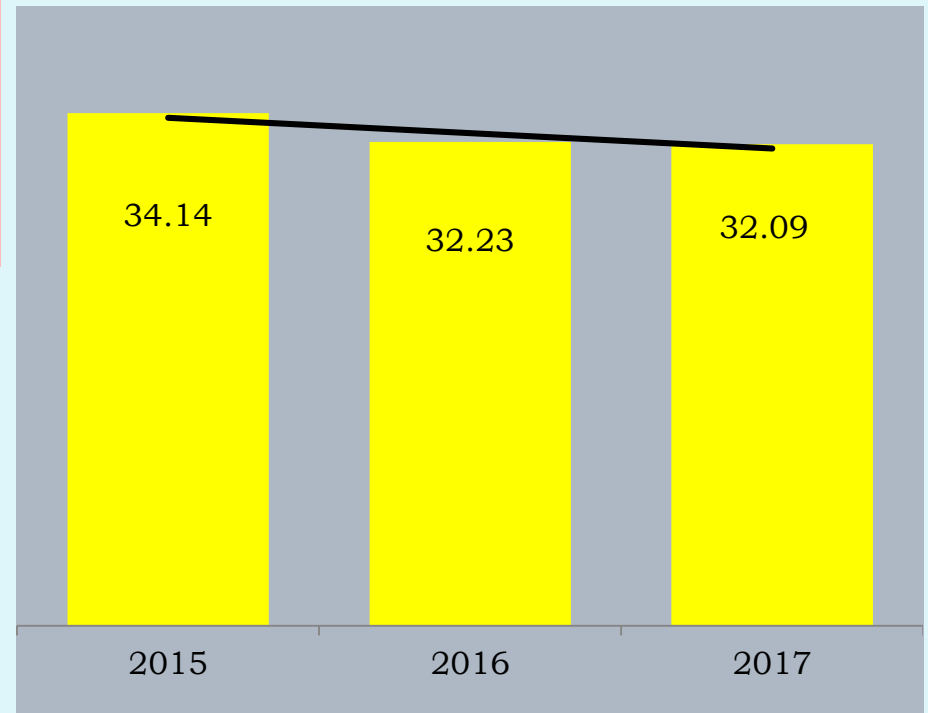
Keterangan: Prevalensi Stunting Pasaman Barat Tahun 2017 lebih tinggi dari Rata-Rata Propinsi maupun Rata-Rata Nasional

IDENTIFIKASI MASALAH

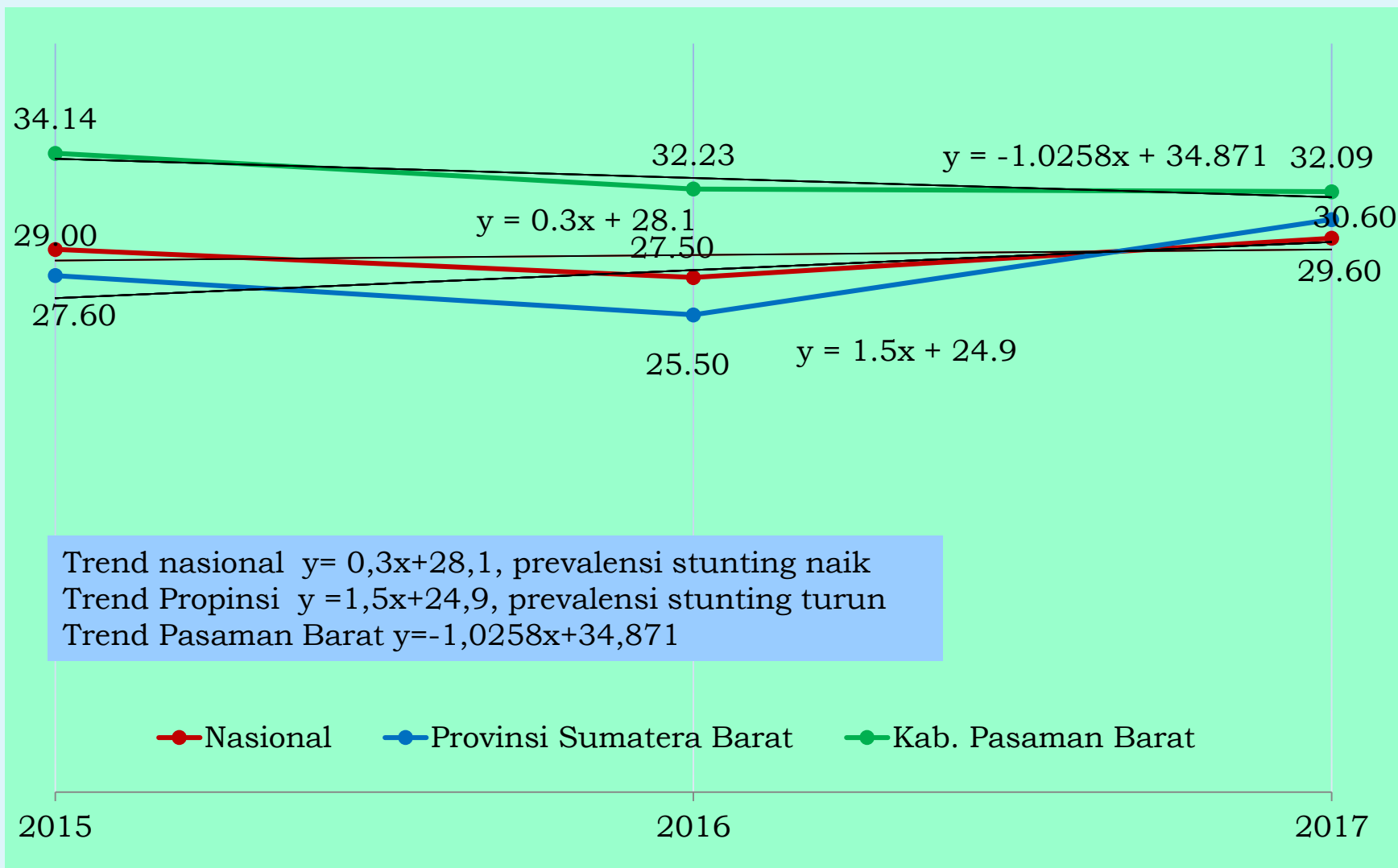


Perkembangan antar Waktu Stunting 0-59 Bulan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 s/d 2017

Analisis Efektifitas Prevalensi Stunting Kab.Pasaman Barat Tahun 2015 -2017

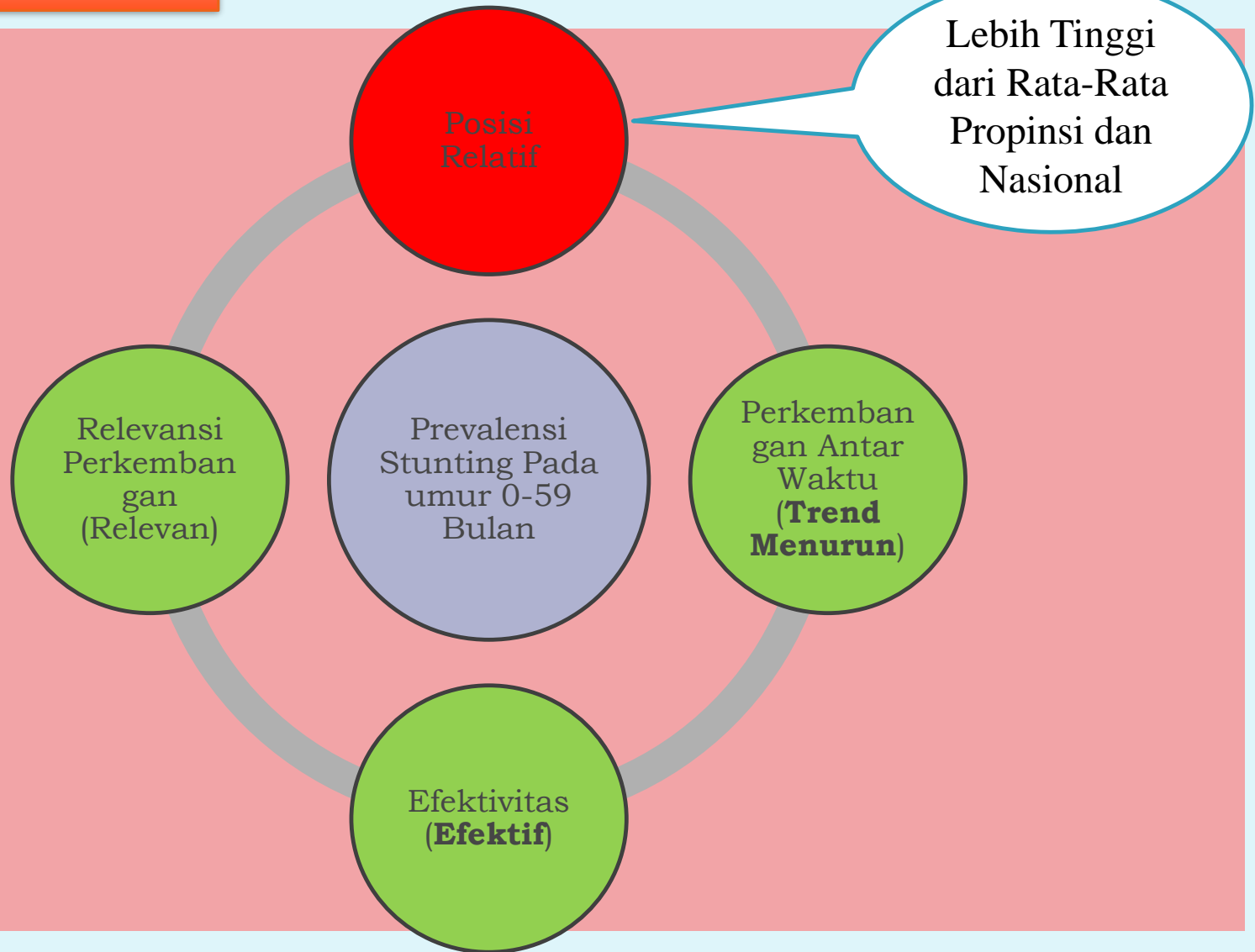


Relevansi Stunting pada balita 0-59 Bulan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015-2017



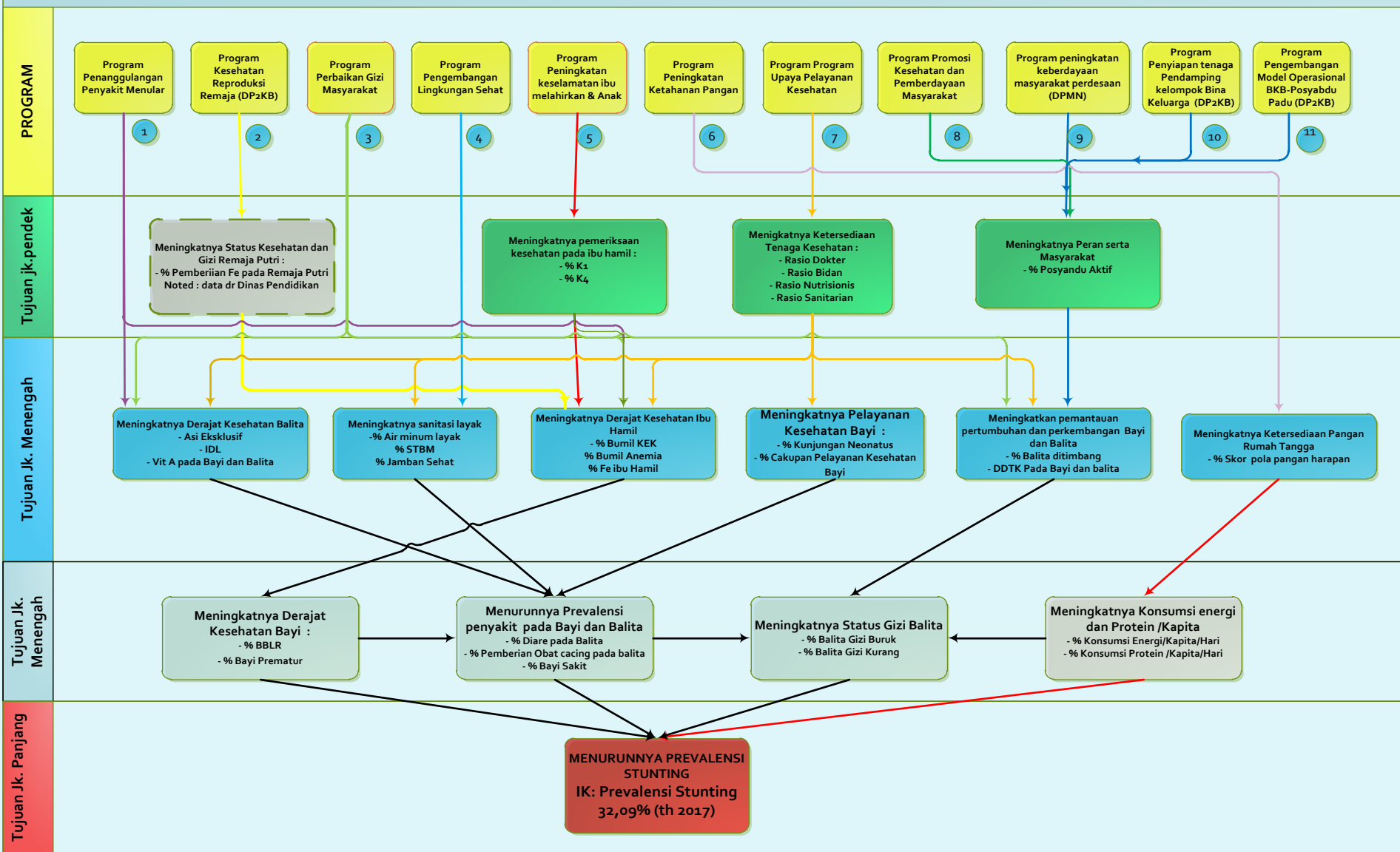
RINGKASAN HASIL IDENTIFIKASI MASALAH STUNTING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

IDENTIFIKASI MASALAH

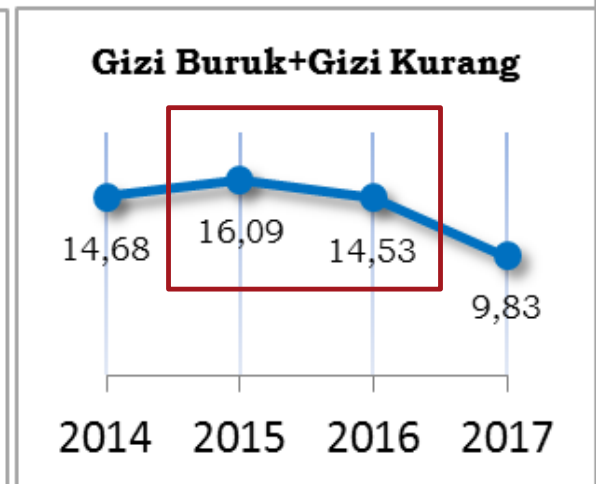
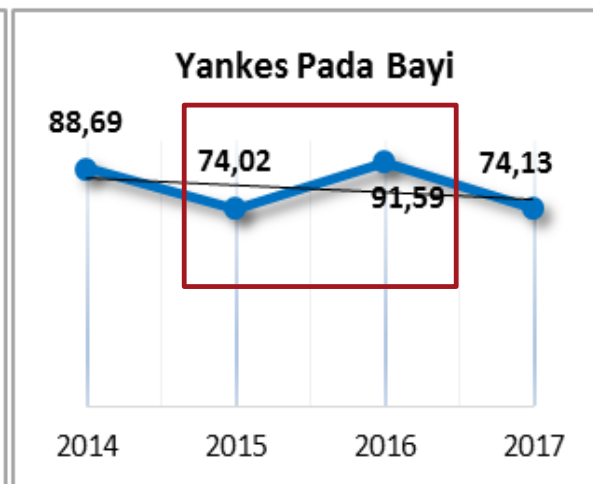
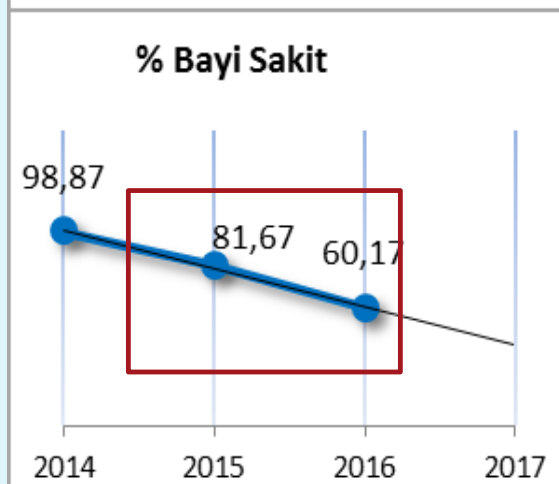
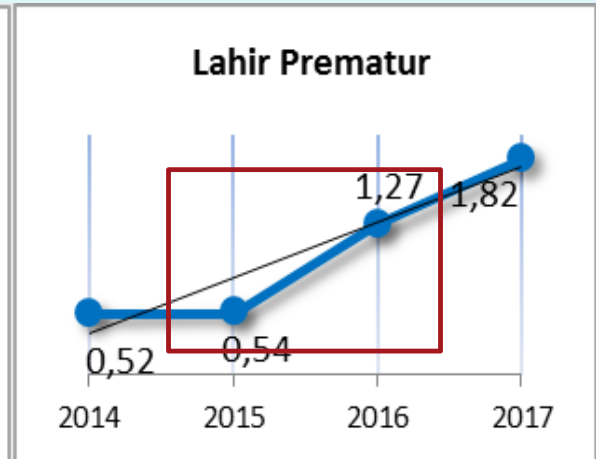
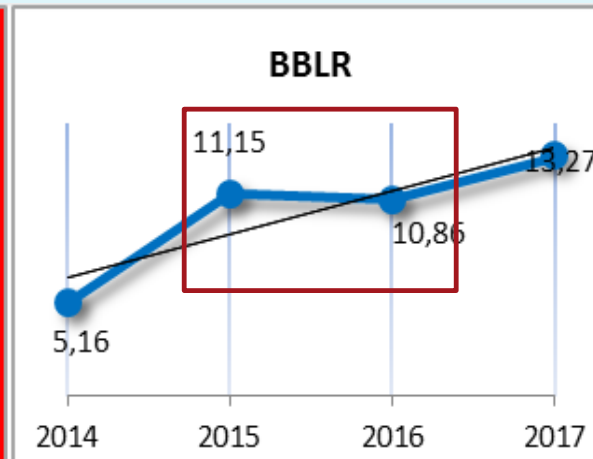
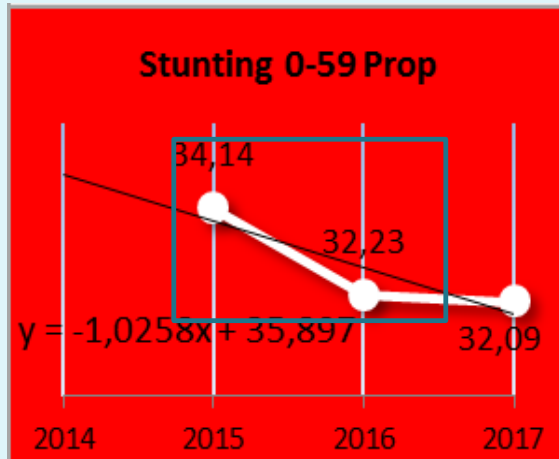


THEORY OF CHANGE (TOC) PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

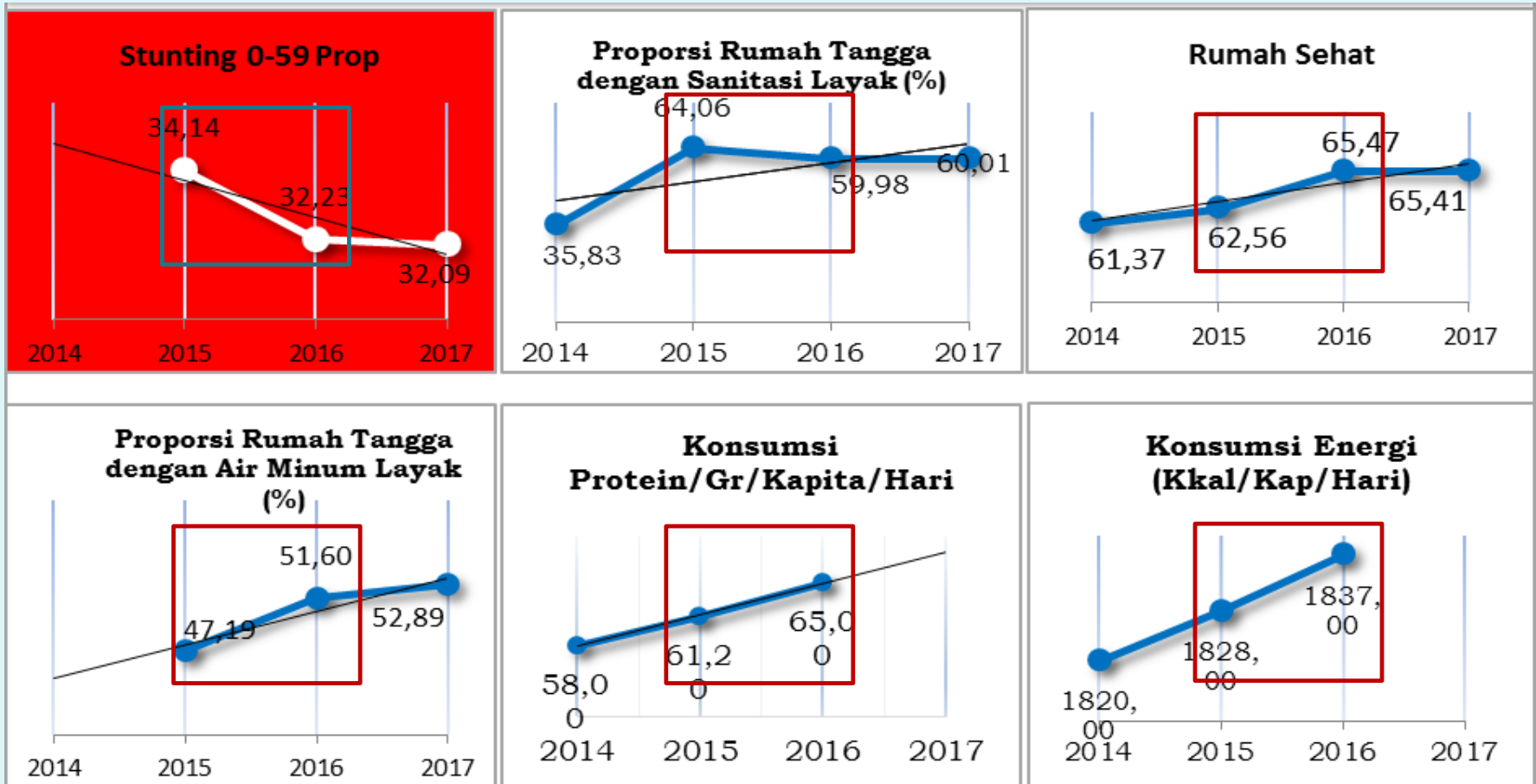
Phase



Keterkaitan Intervensi Gizi Spesifik Kabupaten Pasaman Barat 2014-2017



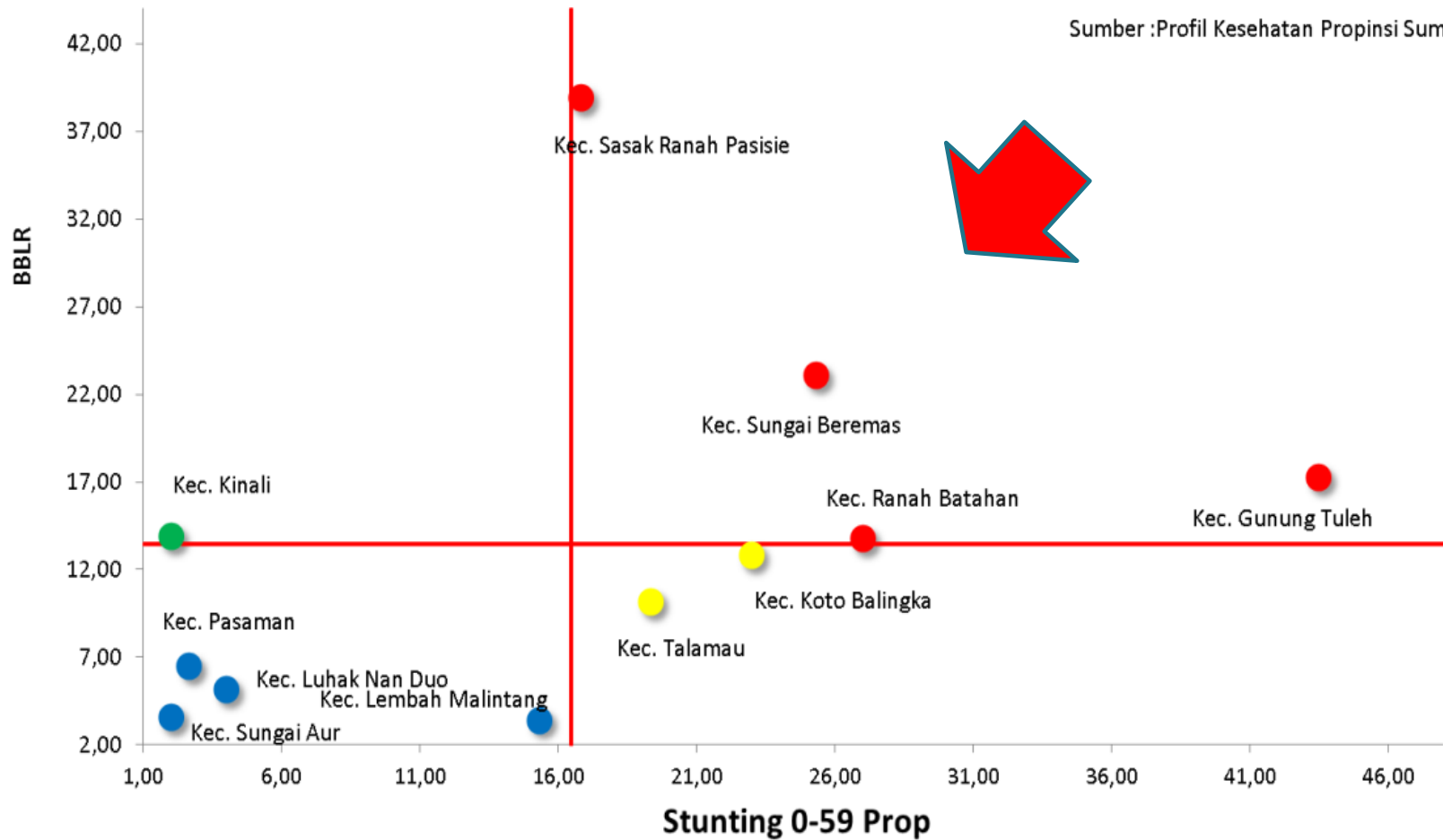
**Analisa Keterkaitan Intervensi Bidang Gizi Sensitif
Kabupaten Pasaman Barat 2014-2017**



PRIORITAS INTERVENSI WILAYAH

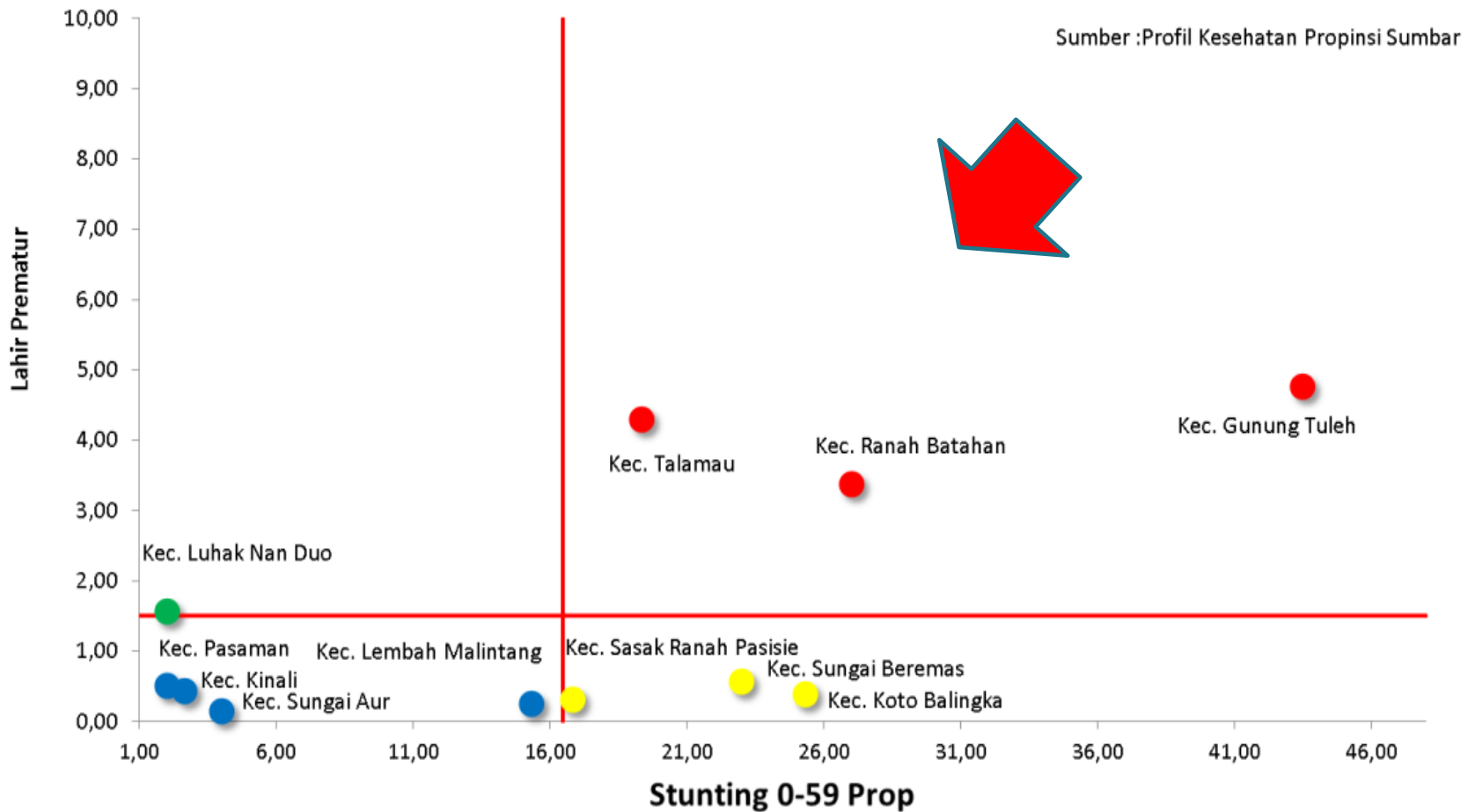
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Stunting 0-59 Prop dan BBLR
Kab. Pasaman Barat - 2016

Sumber : Profil Kesehatan Propinsi Sumbar



PRIORITAS INTERVENSI WILAYAH

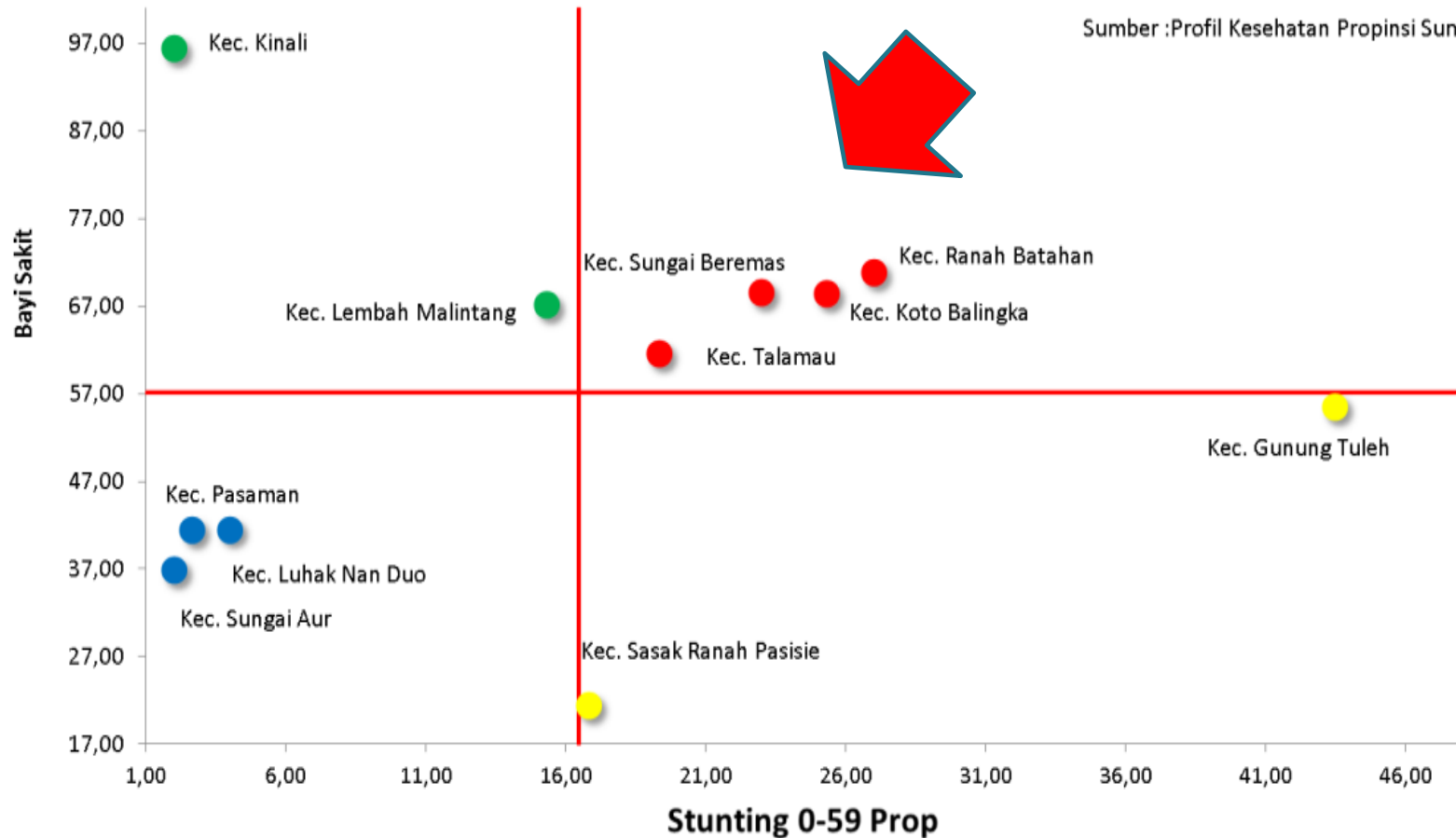
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Stunting 0-59 Prop dan Lahir Prematur
Kab. Pasaman Barat - 2016



PRIORITAS INTERVENSI WILAYAH

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Stunting 0-59 Prop dan Bayi Sakit
Kab. Pasaman Barat - 2016

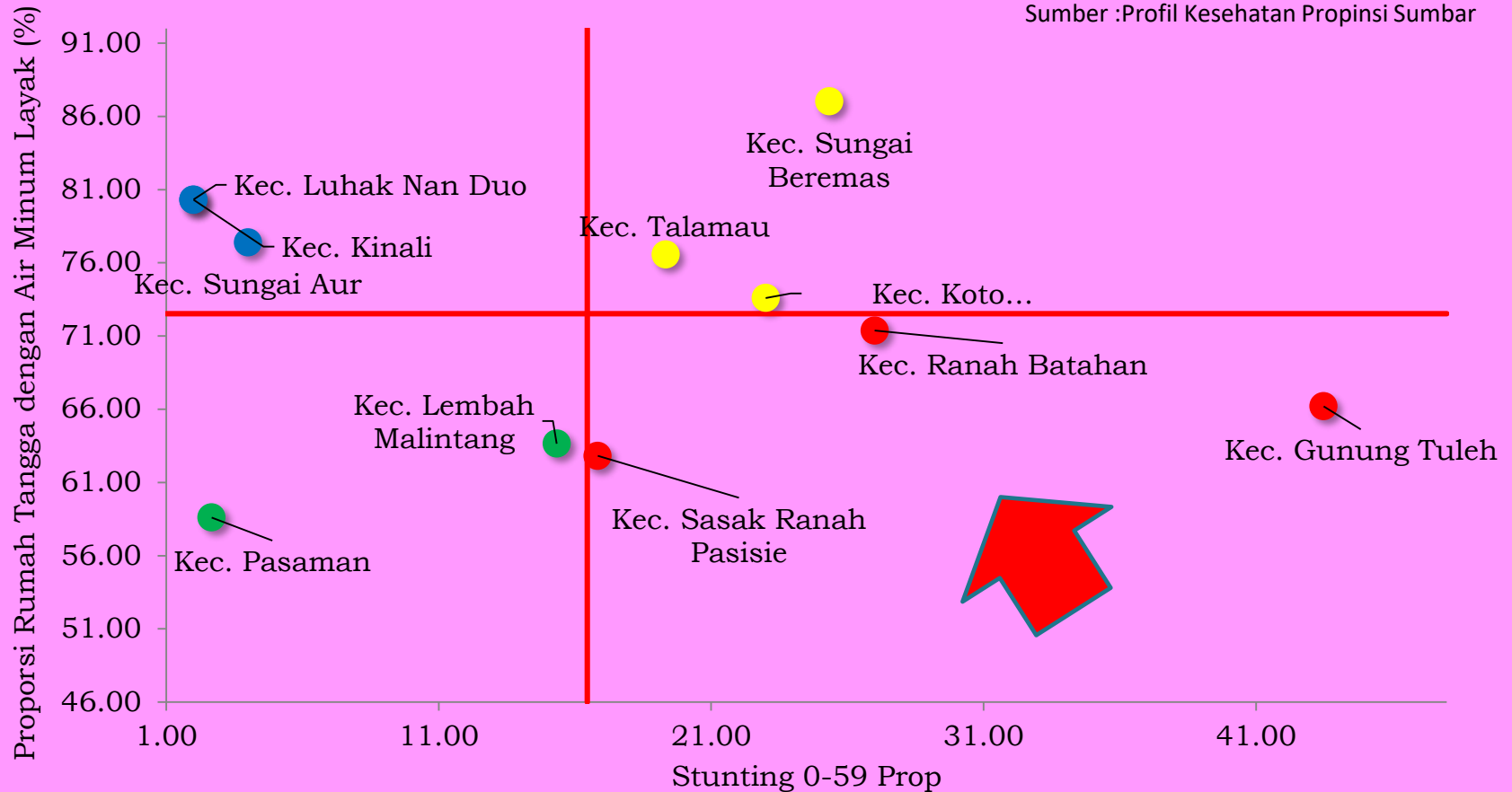
Sumber : Profil Kesehatan Propinsi Sumbar



PRIORITAS INTERVENSI WILAYAH

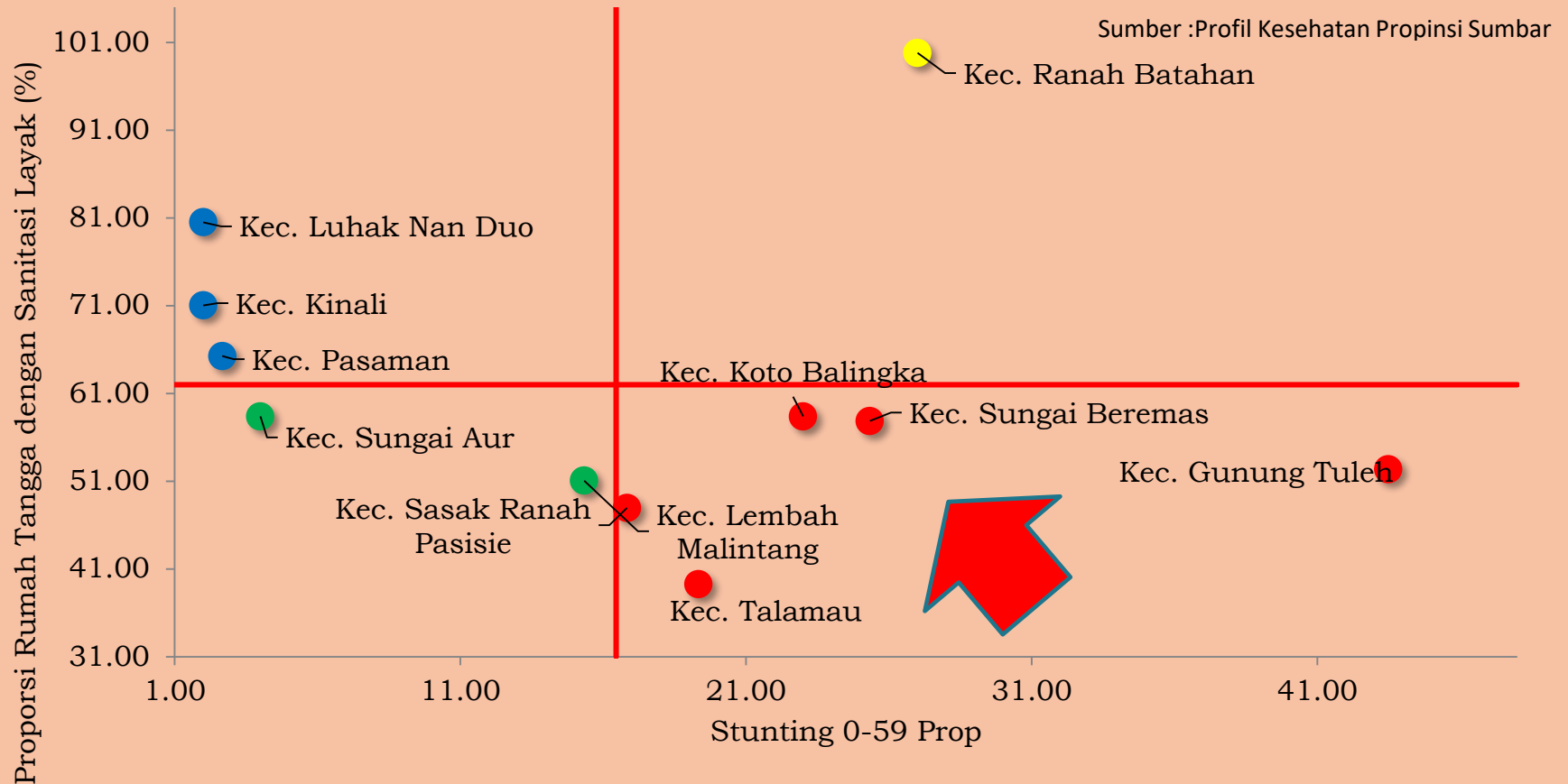
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Stunting 0-59 Prop dan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Pasaman Barat - 2016

Sumber : Profil Kesehatan Propinsi Sumbar



PRIORITAS INTERVENSI WILAYAH

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Stunting 0-59 Prop dan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Pasaman Barat - 2016



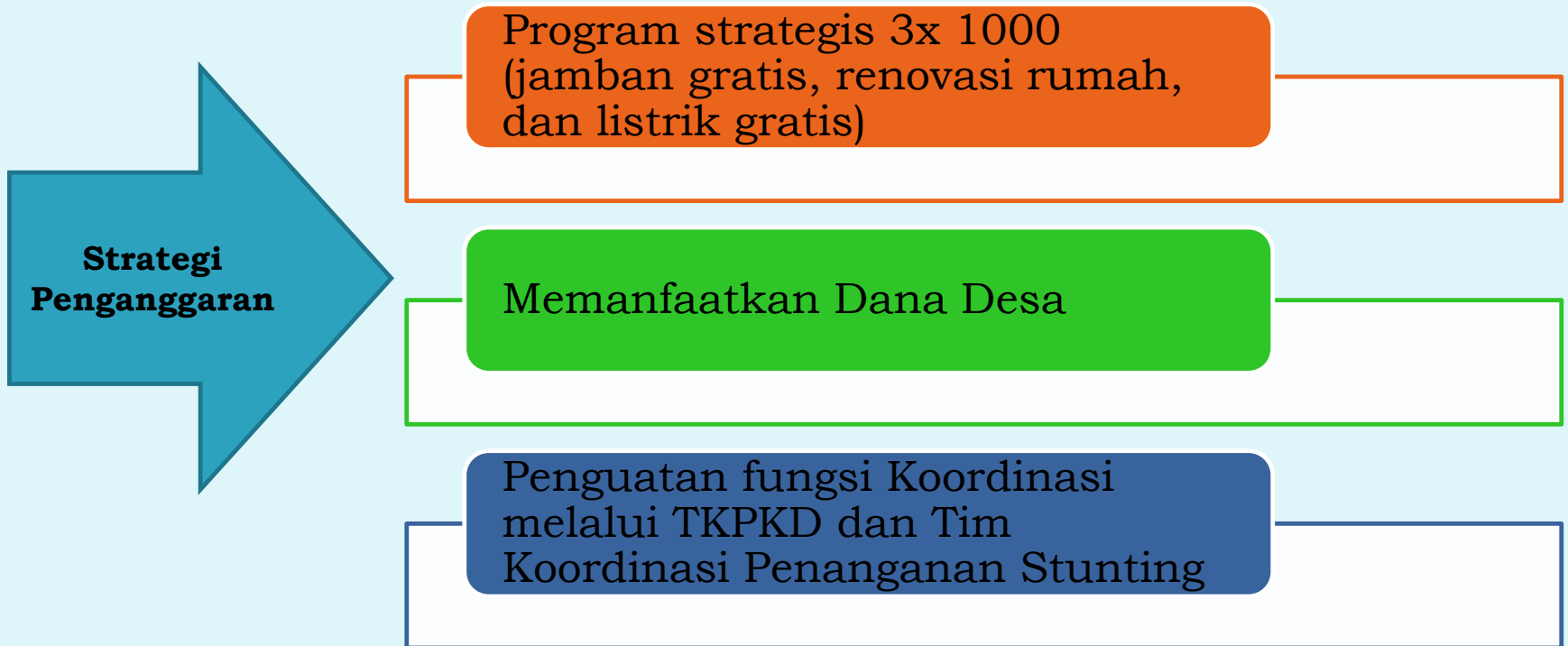
BAGIAN III

ANGGARAN

PENGANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran untuk intervensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp. 151.327.479.839,- Yang terdiri dari:

- a) Intervensi gizi spesifik = Rp. 13,7 Milyar
- b) Intervensi Gizi Sensitif = Rp. 157,5 Milyar



PENGANGGARAN

Program strategis 3x 1000 (jamban gratis, renovasi rumah, dan listrik gratis)

Program 3x1000 berupa bantuan jamban gratis, renovasi rumah tidak layak huni, dan listrik gratis sudah dijalankan sejak TA 2016, dilaksanakan oleh OPD dan Kecamatan

Sejak Tahun 2017, program prioritas ini diperkuat dengan dukungan dana nagari (dana desa)

Kerjasama dengan TNI untuk pembangunan jamban bagi masyarakat



PEMANFAATAN DANA DESA

Keharusan bagi Nagari mengalokasikan minimal 10% anggarannya untuk Pengentasan Kemiskinan

Mengakomodir program penanganan stunting pada Peraturan Bupati tentang Penyusunan Anggaran Nagari

Melimpahkan pengelolaan seluruh Polindes dari Dinas Kesehatan ke Nagari, sehingga Nagari bisa mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Polindes

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN REGULASI

Tim Koordinasi Penanganan Stunting yang terdiri dari OPD TKPKD

Tim Analisis Belanja Publik yang terdiri dari Kasubbag Program pada OPD TKPKD

Mengakomodir isu penanganan stunting pada dokumen perencanaan daerah

Penyusunan Regulasi, seperti Peraturan Bupati tentang GERMAS untuk penurunan Stunting

Integrasi program lintas-OPD, seperti penganangan Kampung KB di lokasi prioritas penanganan stunting (10 Nagari)



TERIMA KASIH

Kampung Pelangi - Eko Darmawan